

2024

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR 1

JALAN SUMATERA NO. 22-24 SURABAYA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Sebelumnya disusun pula Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang berguna untuk mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaan tugas strategis dalam bidang penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan. Pada dasarnya LAKIN, RKT, dan PK merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi, yang diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Surabaya Gubeng menuju terwujudnya good governance, dan transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

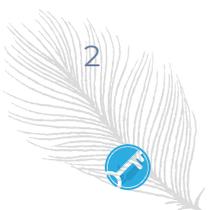
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Gubeng mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Keuangan (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan gambaran atas pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Surabaya Gubeng tahun 2024 kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan dapat memberikan masukan sebagai pendorong peningkatan kinerja KPP Pratama Surabaya Gubeng di masa mendatang.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sakdun
NIP 196804151993101001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
1.3. WILAYAH KERJA KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG.....	6
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
1.5. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG	8
1.6. SARANA DAN PRASARANA.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. VISI.....	10
2.2. MISI.....	10
2.3. SASARAN STRATEGIS	11
2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
3.1.1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.....	14
3.1.2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	16
3.1.3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.....	19
3.1.4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.....	21
3.1.5. Persentase pengawasan pembayaran masa	21
3.1.6. Pengujian kepatuhan material yang efektif.....	24
3.1.7. Penegakan hukum yang efektif.....	25
3.1.8. Data dan informasi yang berkualitas	28
3.1.9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.....	29
3.1.10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel	31
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	34
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan arah yang optimis setelah berhasil mengatasi dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5% hingga 5,5% pada tahun 2024. Proyeksi ini didorong oleh sejumlah faktor, termasuk stabilitas konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta ekspor yang terus menguat. Perbaikan ekonomi nasional juga digambarkan melalui kinerja berbagai lapangan usaha dan seluruh wilayah yang tetap baik. Pemerintah juga akan terus memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, guna meningkatkan konektivitas antar daerah dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

KPP Pratama Surabaya Gubeng merupakan instansi pemerintah setingkat Unit Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengemban tugas dalam melaksanakan pelayanan administrasi di bidang perpajakan. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang dikelola oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng ialah administrasi pajak pusat yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai.

Komponen pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan di masa pemulihan tahun 2024 diproyeksikan tumbuh dengan fokus kebijakan mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Penerimaan pajak merupakan kontributor utama terhadap pendapatan negara yang dianggarkan dalam APBN. Peran serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng semakin nyata dengan adanya target penerimaan pajak yang diamanahkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.617.034.180.000,00.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.



1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pengusaaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Surabaya Gubeng menyelenggarakan fungsi:

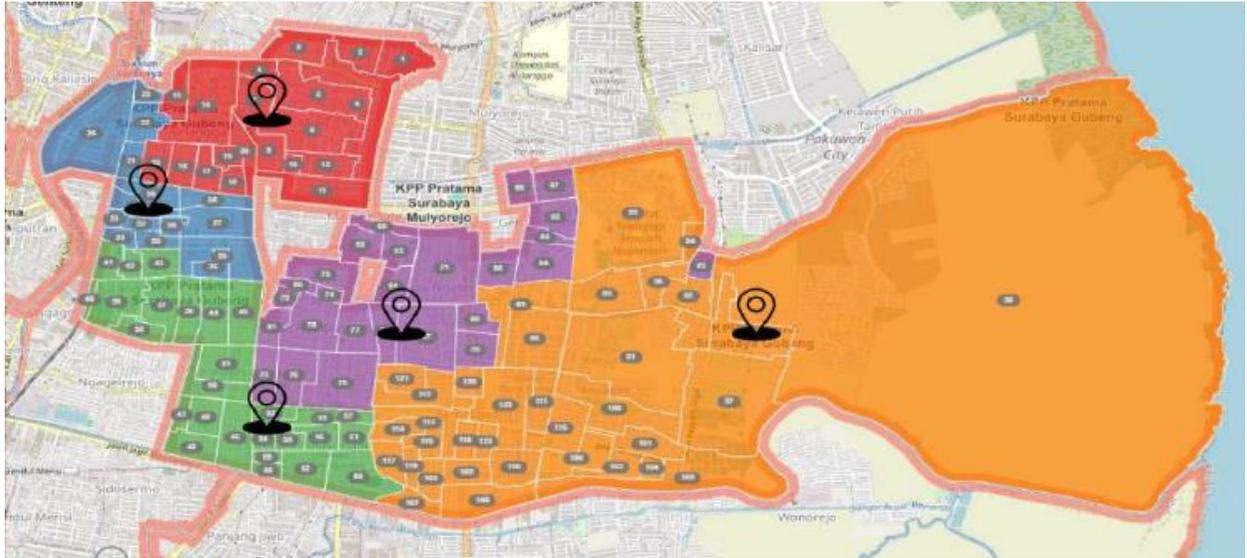
1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek pajak dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
4. pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan wajib pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.



1.3. WILAYAH KERJA KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memiliki wilayah kerja di Kota Surabaya yang meliputi 2 (dua) Kecamatan, yaitu:

Gambar 1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Gubeng



1. Kecamatan Gubeng :
 - a. Kelurahan Baratajaya;
 - b. Kelurahan Pucang Sewu;
 - c. Kelurahan Gubeng;
 - d. Kelurahan Mojo;
 - e. Kelurahan Kertajaya;
 - f. Kelurahan Airlangga
2. Kecamatan Sukolilo :
 - a. Kelurahan Gebang Putih;
 - b. Kelurahan Keputih;
 - c. Kelurahan Klampis Ngasem;
 - d. Kelurahan Medokan Semampir;
 - e. Kelurahan Nginden Jangkungan;
 - f. Kelurahan Semolowaru;
 - g. Kelurahan Menur Pumpungan

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng pada tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 91 orang. Berikut ini komposisi pegawai berdasarkan beberapa jenis pembagian kelompok :

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Nama Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum dan KI	10
3	Account Representative (AR)	27
4	Pelaksana	29
5	Juru Sita	3
6	Bendaharawan	1
7	Sekretaris	1
8	Fungsional Pemeriksa Pajak	13
9	Fungsional Penyuluh Pajak	3
10	Asisten Penyuluh Pajak	3

Tabel 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata-2	18
2	Strata-1/ Diploma-IV	42
3	Diploma-III	14
4	Diploma-I	15
5	SMA sederajat	2

Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-c	1
2	IV-b	1
2	IV-a	8
3	III-d	22
4	III-c	7
5	III-b	18
6	III-a	11
7	II-d	3
8	II-c	8
9	II-b	12



Tabel 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jumlah
1	Perempuan	33
2	Laki-laki	58

1.5. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pengawasan I;
5. Seksi Pengawasan II;
6. Seksi Pengawasan III;
7. Seksi Pengawasan IV;
8. Seksi Pengawasan V;
9. Seksi Pengawasan VI;
10. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Gubeng



1.6. SARANA DAN PRASARANA

1. Gedung
KPP Pratama Surabaya Gubeng berlokasi di Jalan Sumatera No. 22-24 Surabaya
2. Inventaris Kendaraan
 - a. Kendaraan Roda Dua : 10 unit
 - b. Kendaraan Roda Empat : 7 unit
3. Jaringan sistem informasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan *Local Area Network* (LAN).
4. Perangkat Komputer terdiri dari:
 - a. Server : 7 unit
 - b. Modem/VSAT : 4 unit (intranet dan internet)
 - c. PC : 108 unit
 - d. Notebook/Laptop : 41 unit
 - e. Printer : 24 unit
 - f. Hub : 17 unit
 - g. Switch : 8 unit
 - h. UPS : 3 unit
 - i. Scanner : 9 unit



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI

Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak.

Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak terkandung dua poin yang dituju yaitu:

1. Poin yang ingin dicapai adalah identitas diri sebagai institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik
2. Poin yang ingin dicapai di masa depan adalah Jaminan Kedaulatan dan Kemandirian Negara dengan pajak yang telah dihimpun oleh DJP

2.2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien diharapkan seluruh komponen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng mengenal apa peran dan program instansinya serta hasil apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sebagai tindak lanjut untuk merealisasikan visi maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yang juga sudah menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

“ Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja”



2.3. SASARAN STRATEGIS

Terdapat sebelas sasaran strategis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan organisasi. Sasaran strategis ini dirumuskan sebagai ukuran pencapaian tujuan KPP Pratama Surabaya Gubeng, yaitu:

- a. Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
- g. Penegakan hukum yang efektif
- h. Data dan informasi yang berkualitas
- i. SDM yang kompeten
- j. Organisasi yang berkinerja tinggi
- k. Pengelolaan keuangan yang optimal

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan organisasi, yaitu penerimaan dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis. Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis dipergunakan indikator, yaitu **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di Tahun 2024, disusun suatu perjanjian kinerja, sebagai dokumen pernyataan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran yang disusun dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2024, adalah sebagai berikut :



Tabel 5 Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



8	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sasaran strategis ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P. Sasaran strategis ini diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Realisasi dari kedua IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6 IKU terkait Penerimaan Pajak Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	1.431.992.641.000	100,00%	1.617.034.180.000	103,93%	1.488.268.114.882	100,14%	1.619.251.275.818
			1.431.992.641.000		1.617.034.180.000		1.431.992.641.000		1.617.034.180.000
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00		100,00		128,17		99,13	



Sampai dengan akhir 2024, IKU Persentase realisasi penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan pajak (netto) dari target sebesar Rp. 1.617.034.180.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.619.251.275.818,00 atau tercapai sebesar 100,14%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak di Tahun 2023, capaian di Tahun 2024 lebih rendah sebesar 3,89% mengingat di Tahun 2023 capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 103,93% yakni sejumlah Rp 1.488.268.114.882,00 dari target sebesar Rp 1.431.992.641.000,00. Dikarenakan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil dari dampak Covid 19, hal ini juga terjadi pada capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, pada Tahun 2024 IKU ini telah tercapai sebesar 99,13. Dengan demikian, secara keseluruhan Penerimaan Negara dari sektor Pajak yang Optimal masih belum tercapai 100%

Pencapaian kedua IKU tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah diimplementasikan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng di antaranya:

- a. meningkatkan kepatuhan tahun berjalan;
- b. melakukan edukasi dan pelayanan yang efektif;
- c. melaksanakan pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- d. meningkatkan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan melakukan kepatuhan pengawasan material yang efektif;
- e. melakukan penegakan hukum yang efektif;
- f. menyediakan data yang berkualitas; serta
- g. melakukan pengelolaan SDM, organisasi dan keuangan yang optimal.



3.1.2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan. Sasaran strategis ini diukur dengan 2 IKU, yaitu IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Realisasi dari kedua IKU tersebut dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7 IKU terkait Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	1.329.761.273.000	100,00 %	1.529.539.950.000	103,59%	1.377.472.520.196	100,13 %	1.531.466.021.789
			1.329.761.273.000		1.529.539.950.000		1.329.761.273.000		1.529.539.950.000
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	39.433	100,00 %	39.903	100,90%	39.788	113,18 %	45.083
			39.433		39.903		39.433		39.903

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Pada Tahun 2024, capaian realisasi IKU ini sebesar 100,13%. KPP Pratama Surabaya Gubeng berhasil menghimpun penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp 1.531.466.021.789 ,00 dari target sebesar Rp 1.529.539.950.000,00. Jika dibandingkan dengan capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak di Tahun 2023, capaian di Tahun 2024 lebih rendah sebesar 3,46% mengingat di Tahun 2023 capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 103,59% yakni sejumlah Rp 1.377.472.520.196,00 dari target sebesar Rp 1.329.761.273.000,00.



Dalam merealisasikan capaian tersebut, berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng :

1. Pengawasan Pembayaran Masa
 - a. Surat Teguran penyampaian SPT
 - b. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan
 - c. Penerbitan STP atas kekurangan/keterlambatan pembayaran pajak
 - d. Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan faktur pajak
2. Dinamisasi angsuran PPh. Pasal 25
 - a. Dinamisasi berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi
 - b. Perhitungan kembali angsuran PPh Pasal 25
 - c. Pemenuhan kewajiban pembayaran atas WP dengan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 dengan penghitungan tertentu (Bank, Perusahaan Masuk Bursa, BUMN/BUMD, dan Lembaga Keuangan Non-Bank)
 - d. Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan, atau upaya hukum (keberatan, banding, dan peninjauan kembali)
3. Penelitian dan tindak lanjut data matching
 - a. Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan
 - b. Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian
 - c. Pemeriksaan data konkret (single tax)
 - d. Kunjungan (visit) dalam rangka SP2DK
 - e. Pemanfaatan dan tindak lanjut alket
 - f. Pengawasan pembayaran Bea Meterai
 - g. Pengawasan atas kegiatan corporate action



4. Pengawasan fasilitas

- a. Penelitian atas pemenuhan kewajiban sesuai SKB yang telah diterbitkan (tidak dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN)
- b. Penelitian dan pengujian atas pemenuhan permohonan kewajiban insentif perpajakan dan penelitian kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif perpajakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

IKU berikutnya yang digunakan sebagai pengukur kepatuhan tahun berjalan yang tinggi ialah capaian realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 113,18% dengan jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan sebanyak 45.083 formulir dari target sebanyak 39.903 formulir. Jika dibandingkan dengan capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak di Tahun 2023, capaian di Tahun 2024 lebih tinggi sebesar 13,9%. Pada Tahun 2023 capaian realisasi IKU ini mencapai 100,90%. Peningkatan capaian dari IKU tersebut dari tahun sebelumnya ini erat kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Surat Himbauan
- b. Mengundang WP untuk Kelas Pajak
- c. Himbauan kewajiban perpajakan melalui sarana Media Sosial
- d. Menerbitkan Surat Tegoran
- e. Penanganan WP TLTB
- f. Penerbitan STP Pasal 7

3.1.3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu IKU yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), realisasi sd. Triwulan IV 2024 sesuai tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8 IKU terkait Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00	102.231.368.000	100,00%	87.494.230.000	108,38%	110.795.594.686	100,33%	87.785.254.029
		%	102.231.368.000		87.494.230.000		102.231.368.000		87.494.230.000

Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,33%. KPP Pratama Surabaya Gubeng berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp 87.785.254.029,00 dari target sebesar Rp 87.494.230.000,00. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 108,38%.



Meskipun demikian, pencapaian realisasi yang telah melebihi target yang ditetapkan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng di antaranya:

1. Pengawasan Pembayaran dan pelaporan
 - a. Surat Teguran penyampaian SPT
 - b. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan
 - c. Penerbitan STP atas kekurangan/keterlambatan pembayaran pajak
 - d. Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan faktur pajak
 - e. Penerbitan STP atas permohonan Keberatan dan/atau Banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian (Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP)
2. Analisis Angsuran masa
Melakukan penghitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 akibat salah hitung dalam SPT Tahunan
3. Penelitian dan tindak lanjut data matching
 - a. Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan
 - b. Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian
 - c. Pemeriksaan data konkret (single tax)
 - d. Kunjungan (visit) dalam rangka SP2DK
 - e. Pemanfaatan dan tindak lanjut alket
 - f. Pengawasan pembayaran Bea Meterai
 - g. Pengawasan atas kegiatan corporate action
 - h. Penetapan NPWP/PKP secara jabatan
 - i. Penelitian atau penerbitan SP2DK komprehensif



4. Pengawasan fasilitas
 - a. Penelitian atas pemenuhan kewajiban sesuai SKB yang telah diterbitkan (tidak dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN)
 - b. Penelitian dan pengujian atas pemenuhan permohonan kewajiban insentif perpajakan dan penelitian kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif perpajakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
 - c. Tindak lanjut Wajib Pajak Tax Amnesty

3.1.4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan dilakukan secara profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Adapun kegiatan Penyuluhan yang dilakukan selama Tahun 2024 meliputi rencana kegiatan penyuluhan sebanyak 40 kegiatan dengan realisasi sebanyak 119 kegiatan atau dengan kata lain telah tercapai sebanyak 297,5%.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan 2 IKU yaitu IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang dituangkan dalam tabel 9 IKU terkait Edukasi dan Pelayanan yang Efektif.



Tabel 9 IKU terkait Edukasi dan pelayanan yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%		74%		84%		88,34%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	81		100		78,55		108,11	

Dilihat dari Tabel capaian realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,34%. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan di Tahun 2023 yakni sebesar 84%. Beralih pada IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, realisasi tahun ini mencapai 108,11 dari target sebesar 100. Capaian ini berkaitan erat dengan upaya-upaya yang dilakukan di antaranya:

- a. Membuat SK Keputusan Tenaga Penyuluh
- b. Menyusun Rencana Penyuluhan 2024
- c. Penyuluhan Hak dan Kewajiban Bendahara
- d. Kelas Pajak WP OP dan Badan
- e. Penyuluhan Sektor Tertentu / KLU tertentu
- f. *Tax Gathering*
- g. Pajak Bertutur
- h. BDS (Business Development Services)
- i. Penyuluhan Hak dan Kewajiban Perpajakan WP baru



3.1.5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Deskripsi sasaran stretegis ini adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Terdapat satu IKU yang digunakan sebagai pengukur sasaran strategis ini yaitu IKU Persentase pengawasan pembayaran masa. Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Capaian sasaran strategis ini dituangkan dalam tabel 10 IKU Persentase Pengawasan pembayaran masa yang efektif berikut:

Tabel 10 IKU terkait Persentase Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%		90%		116%		119,03%	

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa capaian realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa di Tahun 2024 sebesar 119,03% dari target sebesar 90%. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 116% dengan target yang sama. Peningkatan capaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng di antaranya:

- a. Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan
- b. Melaksanakan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
- c. Menindaklanjuti penyandingan data (*data matching*)



3.1.6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak baik subjektif maupun objektif. Kondisi ini tentunya mendorong terwujudnya kepatuhan sukarela. Dalam sasaran strategis ini digunakan tiga IKU sebagai pengukur, yaitu

1. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan,
2. IKU Persentase Pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan
3. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Tabel 11 IKU terkait 3.1.6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%		100%		120%		120%	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%		100%		120%		120%	
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-		100%		-		115,58%	



Dilihat dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di Tahun 2024 sebesar 120% dari target 100%. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan capaian realisasi IKU di Tahun 2023 yakni memenuhi realisasi secara maksimal.

Beralih pada IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, pada tahun 2024 IKU ini mencapai realisasi 120% dari target sebesar 100%. Kondisi ini juga masih sama jika dibandingkan dengan capaian realisasi IKU di Tahun 2023 yakni memenuhi realisasi secara maksimal.

Pada Tahun 2023 tidak terdapat IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sehingga tidak dapat disandingkan peningkatan/penurunan capaiannya dengan tahun 2023. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng dalam mencapai realisasi IKU yang optimal:

- a. Melakukan monitoring terhadap data dan/atau keterangan yang harus nditindaklanjuti.
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan analisis data dan/atau keterangan
- c. Melakukan analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pengolahan data dan informasi.

3.1.7. Penegakan hukum yang efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis ini menggunakan tiga IKU, yaitu

1. IKU Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian,
2. IKU Efektivitas Penagihan, dan
3. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.



Tabel 12 IKU terkait Penegakan hukum yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80%		100%		87,32%		120%	
7b-CP	Tingkat efektifitas Penagihan	75%		75%		94,07%		109,95%	
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-		100%		-		100%	

Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa capaian realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2024 mencapai 120% dari target sebesar 100%. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 87,32% meskipun dengan target yang berbeda yakni sebesar 80%.

Beralih pada IKU Persentase Tingkat efektifitas Penagihan, pada tahun 2024 telah mencapai 109,95% dari target sebesar 75%. Kondisi capaian realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 94,07% dari target yang sama yakni sebesar 75%.

Sementara untuk IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, pada tahun 2024 telah mencapai realisasi sebesar 100% dari target 100%. Pada Tahun 2023 tidak terdapat IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sehingga tidak dapat disandingkan peningkatan/penurunan capaiannya dengan tahun 2023. Dalam hal ini dapat dikatakan jika seluruh IKU atas sasaran strategis Penegakan Hukum yang Efektif telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian realisasi IKU yang melebihi target ini tentunya berkaitan erat dengan upaya-upaya yang diterapkan di KPP Pratama Surabaya Gubeng di antaranya :

1. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
 - a. Mengusulkan pemeriksaan Wajib Pajak potensial
 - b. Memastikan Pemeriksaan tetap berjalan dan mempercepat proses pemeriksaan tunggakan SP2
 - c. Menyiapkan data sehingga nilai SKP sesuai dengan data DSPP
 - d. Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan.
 - e. Memperkuat data sehingga WP menyetujui hasil pemeriksaan
2. IKU Efektivitas Penagihan
 - a. Melakukan Penerbitan Surat Teguran
 - b. Pemberitahuan Surat Paksa
 - c. Melakukan Pemblokiran
 - d. Melakukan Penyitaan
 - e. Penjualan Barang Sitaan
 - f. Melakukan pencegahan
3. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - a. Meningkatkan kualitas usulan
 - b. Melengkapi data aset yang dimiliki WP saat pemeriksaan.
 - c. Melakukan upaya secara persuasif kepada Wajib Pajak terkait pembayaran atas SKP yang telah terbit
 - d. Menyelesaikan pemeriksaan yang memiliki potensi pajak dan kemampuan bayar Wajib Pajak tinggi
 - e. Melakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan



3.1.8. Data dan informasi yang berkualitas

Maksud dari sasaran strategis ini ialah data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur menggunakan IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13 IKU terkait Data dan informasi yang berkualitas

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	100%		120%		120%	
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%		55%		55%		61,5%	

Dari Tabel 13 dapat dilihat bahwa capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di tahun 2024 mencapai 120% dari target sebesar 100%. Dengan demikian realisasi yang dicapai telah melebihi target yang ditentukan. Hal serupa terjadi pada IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dimana capaian realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP di tahun 2024 mencapai 61,5% dari target sebesar 55%. Kondisi capaian realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 55% dari target yang sama yakni sebesar 55%.



Pencapaian melebihi target ini berkaitan erat dengan upaya-upaya yang diimplementasikan KPP Pratama Surabaya Gubeng di antaranya:

- a. Melakukan kegiatan pengawasan, ekstensifikasi perpajakan, penagihan, pemeriksaan, penilaian, intelijen perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah dan/atau kepentingan perpajakan lainnya untuk mendukung kegiatan pengamatan
- b. Melakukan pengumpulan data dari pihak eksternal
- c. Melakukan perekaman tepat waktu

3.1.9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Definisi dari sasaran strategi ini ialah penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis ini, sasaran strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dipengaruhi oleh 3 komponen IKU :

1. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
2. Indeks Penilaian Integritas Unit
3. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Sasaran strategis ini disusun untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) serta menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Pencapaian realisasi dari ketiga IKU tersebut dituangkan dalam tabel 14 sebagaimana berikut:



Tabel 14 IKU Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	82%		100%		100%		116,53%	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85		85		96,30		96,33	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90		90		96,45		97,23	

Dilihat dari Tabel 14, capaian realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM mencapai 116,53% dari target sebesar 82%. Tercapainya target ini tidak terlepas dari upaya yang diterapkan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan meningkatkan *skill* dan *knowledge* pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2023 dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 82%. Kondisi IKU dapat digambarkan melalui perbedaan perbandingan antara jumlah pegawai pelaksana yang lulus ujian kompetensi dengan jumlah pegawai pelaksana yang mengikuti ujian kompetensi.

Beralih pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, pada tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Gubeng memperoleh nilai 96,33 dari target sebesar 85. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 96,30 dari target sebesar 85.

Sejalan dengan hal tersebut, IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di tahun 2024 mencapai 97,23% dari target sebesar 90,00%. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian realisasi IKU di tahun 2023. Pada tahun 2023, dengan target IKU yang sama KPP Pratama Surabaya Gubeng mencapai realisasi IKU sebesar 96,45% dari target sebesar 90,00%.



Di balik capaian tersebut, KPP Pratama Surabaya Gubeng senantiasa melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong tercapainya sasaran strategis ini dengan cara:

- a. Melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi bulanan atas capaian MR untuk setiap penanggung jawab
- b. Melaksanakan rapat DKO sesuai manual IKU
- c. Melaksanakan FGD sesuai petunjuk manual IKU

3.1.10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran digunakan sebagai pengukur tercapainya sasaran strategi ini.

Tabel 15 IKU terkait Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Kode IKU	Nama IKU	Target				Realisasi			
		2023		2024		2023		2024	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100		100		99,57		120	

Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa di tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Gubeng berhasil memperoleh realisasi IKU sebesar 106% dari target sebesar 100%. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023. Pada tahun 2023, dengan target IKU yang sama KPP Pratama Surabaya Gubeng mencapai realisasi IKU sebesar 99,57% dari target sebesar 100,00%. Perhitungan nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di tahun 2024 dapat dilihat dalam Gambar 3.

Gambar 3 Perhitungan nilai IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

Pencapaian tersebut tentunya berkaitan erat dengan upaya-upaya yang diterapkan di KPP Pratama Surabaya Gubeng di antaranya:

- a. Rutin melaksanakan monitoring realisasi anggaran setiap bulan dengan memanfaatkan Karwas (Kartu Pengawasan)
- b. Mempercepat proses pengadaan sesuai RPD

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi.

Untuk mendukung pencapaian kegiatan dan sasaran yang dilakukan melalui kegiatan, dibiayai dari dana DIPA dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 16 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	(%)
1.	DIPA (DIPA diluar belanja pegawai)	6,359,778,000	6,239,767,475	98.11%

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ataupun aturan-aturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Keuangan (Permenpan Nomor 53/2014) dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pencapaian Hasil Penilaian atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 adalah sebesar 108.60%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2024 berhasil mencapai sasaran utama yang ditetapkan yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 100,14%.

Terkait dengan pencapaian kinerja di tahun 2025, diharapkan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dapat ditingkatkan atau minimal sama dengan pencapaian kinerja Tahun 2024. Upaya-upaya perbaikan dan inovasi-inovasi akan dilakukan secara terus menerus oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng demi tercapainya target penerimaan pajak Tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi (*stakeholder*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sakdun
NIP 196804151993101001

LAMPIRAN

KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR 1

JALAN SUMATERA NO. 22-24 SURABAYA



**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KPP KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	99,71
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,71
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,14%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,14
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,13	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,13
Customer Perspective							20,00%	102,99
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,64
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,13
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,18%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,18
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,33
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,33%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,33



Internal Process Perspective							25,00%	116,05
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,75
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,34%	Max	E/M	21,00%	50,00%	119,38
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,11%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,11
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,03%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,52
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,58%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,58
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	109,95%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							115,29
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	111,82
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,31
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,62
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	116,53	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,53
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,33	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,33
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,23	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,03

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,60

Mengetahui
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Sakdun
NIP 196804151993101001

Surabaya, 17 Januari 2025

Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Hikmah
NIP 196808181995032002



**RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
PERIODE PELAPORAN: S.D. DESEMBER TAHUN 2024**

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	x 100%	100,00%	1.630.964.300.000	100,14%	1.619.251.275.818
		Target penerimaan pajak			1.630.964.300.000		1.617.034.180.000
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)		100		99,13	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100,00%	1.428.668.544.000	100,13%	1.531.466.021.789
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			1.428.668.544.000		1.529.539.950.000
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$		100,00%	39.903	113,18%	45.083
					39.903		39.903
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100,00%	202.295.756.000	100,33%	87.785.254.029
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM			202.295.756.000		202.295.756.000
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}		74,00%		88,34%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei		85%		108,11%	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		90,00%		119,03%	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		100,00%		120,00%	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching)	x 100%	100,00%		120,00%	
		2					
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		100,00%		115,58%	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)		100,00%		120,00%	
		(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)					



7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	75,00%		109,95%																					
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	100,00%	100,00%																					
		Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah																								
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$	x 100%	100,00%	120,00%																					
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$		55,00%	61,50%																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	100		116,53																					
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	85		96%																					
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90		97,23																					
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		100	120																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks Tw IV</th> <th>Formula Konversi Tw IV</th> <th>Kriteria Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>120</td> <td>Realisasi IKKPA > 95,00</td> </tr> <tr> <td>100 < X < 120</td> <td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **</td> <td>(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>Realisasi IKKPA = 91,00</td> </tr> <tr> <td>80 < X < 100</td> <td>80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *</td> <td>(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>Realisasi IKKPA = 80,00</td> </tr> <tr> <td>79,9</td> <td>79,9</td> <td>Realisasi IKKPA < 80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indeks Tw IV				Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00
		Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV				Kriteria Indeks																			
		120	120				Realisasi IKKPA > 95,00																			
		100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **				(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)																			
		100	100				Realisasi IKKPA = 91,00																			
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)																								
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																								
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																								

Mengetahui
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Sakdun
NIP.19680415 199310 1 001

Surabaya, 17 Januari 2024

Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Hikmah
NIP 196808181995032002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	015-119567	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG	031	PAGU	800,974,000	4,680,274,000	878,530,000	0	0	0	0	0	0	6,359,778,000
				REALISASI	773,818,000	4,623,586,810	842,362,665	0	0	0	0	0	0	6,239,767,475
				PERSENTASE	(96.61%)	(98.79%)	(95.88%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(98.11%)
				SISA	27,156,000	56,687,190	36,167,335	0	0	0	0	0	0	120,010,525
TOTAL				PAGU	800,974,000	4,680,274,000	878,530,000	0	0	0	0	0	0	6,359,778,000
				REALISASI	773,818,000	4,623,586,810	842,362,665	0	0	0	0	0	0	6,239,767,475
				PERSENTASE	(96.61%)	(98.79%)	(95.88%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(98.11%)
				SISA	27,156,000	56,687,190	36,167,335	0	0	0	0	0	0	120,010,525

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)